IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN STUNTING DI KECAMATAN KEMA KABUPATEN MINAHASA UTARA

ARTIKEL JURNAL

AGRI YANI TOLINGGI
NIM: D02420001

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
2024

IMPLEMENTASI KEBJAKAN PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN STUNTING DI KECAMATAN KEMA KABUPATEN MINAHASA UTARA

Agri Yani Tolinggi[1],Rusly Abdurrahman Idji [2],Widya Kurniati Mohi[3]
[1,2,3]Program Studi Administrasi Publik,Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Gorontalo 2024

Email : agritolinggi@gmail.com

ABCTRACT

The aim of this research is to determine the implementation of policies in preventing stunting in Kema District, North Minahasa Regency. This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. Data collection techniques use observation, interviews and documentation studies. The research results showed that there were 3 programs run by the Kema District government to prevent stunting, namely Socialization, Posyandu and Stunting Kitchen. In carrying out these 3 programs, there are 3 aspects that measure the smoothness of the program, namely 1) The level of compliance with applicable regulations, 2) The smooth implementation of routine functions, and 3) The realization of the desired performance and impact has not gone well. Even though the program is running smoothly according to the provisions, various weaknesses are still found in other indicators. In the research, several inhibiting factors were also found in the implementation of the program, namely factors such as lack of human resources, lack of public awareness and genetic factors from the family. So it is hoped that the government can improve the smooth running of the program by supporting capable human resources and the stunting kitchen program can become a permanent program that is implemented once a week.

Keywords: Implementation, Policy, Stunting

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan dalam pencegahan stunting di Kecamatan Kema kabupaten Minahasa Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi,wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa ada 3 program yang di jalankan oleh pemerintah Kecamatan Kema dalam pencegahan stunting yaitu Sosialisasi, Posyandu dan Dapur Stunting. Dalam menjalankan 3 program ini ada 3 aspek yang mengukur kelancaran program yaitu 1) Tingkat kepatuhan pada ketentuan yanng berlaku, 2) Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi, dan 3) Terwujudnya kinerja dan dampak yang di kehendaki ini belum berjalan dengan baik. Meskipun dalam kelancaran program sudah berjalan sesuai ketentuan namun masih ditemukan berbagai kelemahan pada indikator lainnya. Dalam penelitian juga ditemukan beberapa faktor penghambat dalam menjalankan program yaitu faktor dari kurangnya SDM, kurangnya kesadaran masyarakat dan faktor genetik dari keluarga. Maka diharapkan pemerintah bisa meningkatkan kelancaran dari program dengan mendukung sumber daya manusia yang memadai dan untuk program dapur stunting bisa menjadi program tetap yang dilaksanakan satu kali dalam seminggu.

Kata Kunci : Impelementasi, Kebijakan, Stunting

PENDAHULUAN

Tolak ukur masyarakat dalam menilai suatu kinerja pemerintah dilakukan pemerintah dilakukan dengan implementasi dari semua program yang sudah direncanakan. Agustino (2006) mengatakan bahwa studi implementasi merupakan kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan suatu kebijakan. Implementasi selalu berhubungan dengan kebijakan, yang pada prinsipnya implementasi kebijakan merupakan cara sebuah kebijakan agar dapat mencapai tujuannya (Nugroho, 2014;657). Untuk fenomena yang sangat menjadi perhatian pemerintah Indonesia saat ini adalah stunting, yang termasuk dalam tujuan kedua SDGs yaitu tanpa kelaparan (*zero hunger).* Tidaka ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan imun serta mendorong budidaya pertanian berkelanjutan.

Mengacu pada Perpres dan kebijakan pembangunan yang tertera pada Bappenaas, maka stunting termasuk prioritas skala nasional. Dalam hal ini pemerintah Indonesia bekerjasama antara kementerian dan lembaga Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial , Kementerian Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Perindustrian BKKBN Perdagangan untuk mencapai tujuan yang kedua dari pembangunan berkelanjutan. Prevelensi stunting di Indonesia menurun dari 24,4% pada tahun 2021 menjadi 21,6% pada tahun 2022, berdasarkan hasil Rapat Kerja Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) BKKBN. Dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang mengatur Tentang kegiatan perbaian gizi masyarakat, memberikan arah, tujuan dan strategi peningkatan gizi masyarakat. Grindel dalam (Tresiana dan Duadji, 2019:56) menyatakan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik juga dapat ditentukan oleh tingkat dilaksanakan kebijakan yang terdiri dari

1) Isi kebijakan *(contend of policy)* yang meliputi

a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan

b. Jenis manfaat yang akan di hasilkan

c. Derajat perubahan yang diinginkan

d. Kedudukan pembuat kebijakan

e. Siapa pelaksana program

f. Sumber daya yang dikerahkan

2) Lingkungan implementasi *(context of implementation)*

a. Kekuasaan kepentingan dan strategi lembaga dan penguasa

b. Karakteristik lembaga dan penguasa

c. Kepatuhan dan daya tangkap.

Pada model implementasi kebijakan dalam teori *Randall B Ripley and Grace A Franklin* menjelaskna ada 3 indikator yang berkaitan untuk mengukur keberhasilan dari kebijakan diantaranya :

1. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku.

Perspektif yang pertama *(compliance perpective)* memahami keberhasilan implementasi sebagai kepatuhan para implementor dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam dokumen kebijakan (dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah atau program).

2. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi.

Bahwa sebuah keberhasilan implementasi ditandai dengan lancarnya rutinitas dan tidak adanya masalah-masalah yang dihadapi .

3. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki.

Bahwa keberhasilan suatu implementasi mengacu dan mengarah pada implementasi /pelaksanaan dan dampaknya (manfaat) yang dikehendaki dari semua program yang dikehendaki.

Dalam Keputusan Presiden (Perpers) Nomor 72 Tahun 2021 tentang percapatan perlambatan. Perpers ini menjadi atap hukum Strategi Nasional (Stranas) yang dicanangkan dan dilaksanakan sejak tahun 2018 untuk mempercepat pengurangan. Perpres ini juga bertujuan memperkuat kerangka intervensi yang berlaku dan lembaga untuk melakukan percepatan pengur angan. Pemerintah menargetkan penurunan prevelensi pertumbuhan sebesar 14 persen pada tahun 2024 dan tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030, berdasarkan pencapaian tahun 2024.

Oleh karenanya dibutuhkan pendekatan kepada masyarakat dalam proses penanggulangan stunting yang berfokus pada empat hal yaitu bagaimana mempersiapkan ibu selama dan sebelum melahirkan, pemberian gizi lengkap kepada bayi dan balita, peningkatan ketahanan pangan dan infrastruktur yang terkait penyediaan air dan sanitasi. Jika proses pendekatan pada masyarakat masih belum optimal maka keberhasilan dari pelaksanaan program yang sudah dirancang tidak akan terpenuhi sesuai target. Sebagaiamana untuk menjalankan semua kegiatan ini kader juga butuh pendampingan dari pihak Pusat Kesehatan Masyarakat dari setiap kecamatan. Dilansir dari data stunting yang ada kecamatan kema merupakan salah satu kecamatan yang mengalami masalah stunting, dimana untuk tingkat stunting di kecamatan kema ini terbilang tinggi dengan jumlah 30 anak yang mengalami stunting. Jika semua pendekatan yang dirangkaikan dnegan kegiatan pada masyarakat sudah berjalan maka tinggal menungu hasil evaluasi, apakah kegiatan yang dilakukan berhasil atau tidak dalam menurunkan kasus stunting yang ada di kecamatan kema.

Ternyata banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa itu stunting dan bagaimana cara pencegahannya, sebab kalau kita merujuk pada kondisi yang terjadi di kecamatan kema sekarang ternyata masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang stunting dan untuk program belum sesuai dengan harapan dari orang tua anak stunting. Pemerintah juga sedang berusaha agar proses dari program ini bisa berjalan dengan lancar tanpa hambatan, akan tetapi semua belum berjalan lancar karena masih banyak kurangnya kesadaran masyarakat yang ada di kecamatan kema. Beberapa orang tua mengatakan bahwa informasi yang disebarkan oleh pemerintah tidak sampai kepada mereka, maka dari itu banyak orang tua yang tidak hadir pada saat posyadu, yang merupakan salah satu program yang dirancang untuk mencegah stunting. Maka dari itu dibutuhkan peran dan fungsi dari pemerintah desa agar semua informasi bisa tersebar kepada seluruh masyarakat.

Hasil dari observasi awal yag dilakukan, peneliti menemukan bahwa ada beberapa masalah pada pelaksanaan kebijakan pencegahan stunting di Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara:

1. Sikap dan peran pemerintah belum optimal dalam proses pelaksanaan

program untuk pencegahan masalah stunting pada.
2. Program yang berjalan belum terealisasi dengan baik
3. Dampak dari program penurunan stunting belum optimal.

Maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui program dan keberhasilan dari program yang dijalankan untuk pencegahan stunting di Kecamatan Kema.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Mukhtar (2013:10) Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahun atau teori terhadap penelitian pada satu waktu. Dalam pendekatan deskriptif kualitatif ini ada 3 prosedur pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan turun langsung ke lapangan, peneliti melihat dan mengamati langsung kondisi lokasi. Pada prakteknya peneliti juga melakukan observasi langsung dan bertemu dengan kepala kantor kecamatan kema.

2. Wawancara

Teknik wawancara dilakukan dengan peneliti menyiapkan *handphone* sebagai alat untuk merekam selama wawancara berlangsung dan mengajukan pertanyaan terstruktur secara lisan kepada informan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti dengan menyiapkan *handphone* sebagai alat untuk mengambil dokumentasi yang dilakukan saat wawacara.

HASIL PENELITIAN

Secara geografis, kecamatan kema adalah salah satu wilayah yang ada di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara yang berada di pesisir pantai timur wilayah Minasaha Utara. Kecamatan kema berbatasan langsung dengan Kota Bitung dari sebelah utara, disebelah timur dengan Maluku Utara, disebelah selatan dengan kecamatan kombi dan disebelah barat berbatasan dengan kecamatan kauditan. Jumlah desa yang ada di kecamatan kema adalah 10 desa yaitu Desa Tontalete, Desa Kema I, Desa Kema II, Desa Kema III, Desa Lilang, Desa Langsot, Desa Waleo I, Desa Waleo II. Desa Makalisung dan Desa Tontalete Rok-Rok.

Kecamatan kema merupakan salah satu dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Luas wilayah kecamtan kema sebesar 120.96 km^2. Sebagian besar wilayah kecamatan kema adalah daratan berupa perkukitan dan sebagian besar wilayah adalah perairan berupa pantai, empang dan laut.

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini yang menjadi pokok pembahasan dari masalah yang didapatkan melalui hasil observasi awal dan dituangkan dalam sub bagian identifikasi masalah yaitu:

1) Sikap dan peran pemerintah yang belum optimal dalam proses pelaksanaan program pencegahan masalah stunting pada anak.
2) Program yang berjalan belum terealisasi dengan baik
3) Dampak dari program penurunan stunting belum optimal.

Dalam kajian observasi awal adanya 3 program yang merupakan kebijakan dari pemerintah yaitu :

a. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan memberi edukasi kepada masyarakat tentang bahaya stunting pada anak-anak. Dalam program ini pemerintah juga melibatkan dinas kesehatan untuk memberikan informasi apa saja gejala anak yang terkena stunting, karena stunting ini dapat dicegah dari masa kehamilan sampai balita, Sasaran sosialisasi bukan hanya orang tua atau ibu hamil tetapi juga kepada remaja yang bertujuan memberikan edukasi tentang bahaya pernikahan dini, ini juga merupakan salah satu cara untuk mencegah stunting. Sosialisasi dilakukan secara bertahap disetiap desa yang ada di kecamatan kema, dengan kerjasama dari pihak dinas kesehatan, BKKBN kecamatan kema, Puskesmas kema dan pemerintah desa.

b. POSYANDU

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola kemudian diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan dan pembagunan kesehatan, untuk memberdayakan masyarakat kemudian memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Posyandu dilakukan setiap 1 bulan sekali, yang bertujuan memberikan imunisasi pada anak bayi sampai balita dan mengecek perkembangan dari ibu hamil, Posyandu dilaksanakan oleh pihak puskesmas, dan kase yang ada di desa, dari kegiatan inilah pemerintah dapat mendata berapa banyak anak yang mengalami stunting.

c. Dapur Stunting

Dapur stunting adalah salah satu inovasi dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 217 Tahun 2021 Tentang Penetapan Pemenang Penilaian Kinerja Tahunan 2021 terhadap aksi 5-8 Konvergensi Penanganan Stunting bagi 4 Kabupaten Lokus Intervensi Tahun 2020 Provinsi Sulawesi Utara.

Dapur stunting ini berjalan selama 90 hari dengan menggunaka anggaran dari desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Dapur stunting berjalan dengan adanya Kerjasama dari BKKBN kecamatan, Puskesmas, dan pemerintah desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam pencegahan stunting di kecamatan kema, yang dituangkan dalam kajian penelitian yang dikombinasikan dengan teori dari *Randall B Riley and Grace A Fanklin* terdiri dari 3 indikator yaitu

1. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku

Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku merupakan salah satu tolak ukur implementasi kebijakan. Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktifitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Dalam Surat Keputusan penetapan dari Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Minahasa Utara yang diberikan kepada setiap desa tentang penunjukan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang berisi tentang Merujuk dan Menetapkan Tim Pendamping Keluarga Percepatan Penurunan Stunting di setiap desa yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Di kecamatan kema ada 3 desa yang menjadi lokus penelitian oleh penliti sudah mendapatkan SK Tim Pendamping Keluarga Percepatan Penurunan Stunting yaitu Desa Tontalete dengan Nomor 11 Tahun 2024, Desa Kema I dengan Nomor 588 Tahun 2024 dan Desa Kema II dengan Nomor 8 Tahun 2024. Dalam penjabaran di SK penetapan Tugas dan Fungsi dari Tim Pendamping Keluarga Percepatan Penurunan Stunting yaitu

a. Melakukan pendampingan bagi keluarga yang memiliki anak BADUTA stunting.
b. Melakukan pendampingan bagi semua calon pengantin.
c. Melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam upaya penanganan stunting.
d. Melakukan pendataan dan pemetaan *(mapping)* bagi keluarga beresiko stunting.
e. Melaksanakan semua program penanganan stunting dalam bentuk kegiatan2 berkelanjutan
f. Monitoring dan mengevaluasi program penanganan stunting
g. Meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui :
1. Penyuluhan
2. Fasilitas pelayanan rujukan
3. Fasilitas penerimaan program bantuan sosial.

Menurut Rahmawati (2015), kepatuhan adalah sikap disiplin atau perilaku taat terhadap suatu perintah maupun aturan yang sudah ditetapkan dengan penuh kesadaran. Dalam proses pelaksanaan kebijakan dibutuhkan kerja sama dan kepatuhan dari pada pemerintah yang bisa dibuat bisa sesuai dengan target dan sasaran.

Menurut Ripley terdapat dua kekurangan dalam kriteria kepatuhan antara lain : (1) banyak faktor non birokratis yang kurang diperahatikan dan (2) adanya program tidak di desain dengan baik.

Maka hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti melalui wawancara kepada informan dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh *stakeholder* di kecamatan dan pemerintah desa bekerja sama untuk melakukan percepatan penurunan dan pencegahan stunting di kecamatan kema. Dengan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah yaitu setiap desa menerapkan Dapur Stunting selama 90 hari kemudian melakukan sosialisasi setiap ada kegiatan posyandu balita dan ibu hamil.

2. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi

Lancarnya semua program merupakan suatu keberhasilan dari implementasi kebijakan, sesuai dengan program yang di rancang maka prosesnya harus sesuai dengan tidak adanya hambatan program. Berdasarkan teori *Randall B Ripley and race A Franklin* dalam Tahir (2014) mengemukakan bahwa “dalam proses pengukuran keberhasilan suatu kebijakan kriteria kelancaran dan tidak adanya persoalan artinya dalam proses pelaksanaan program para petugas pelaksana kebijakan sebisa mungkin dapat menghindari permasalahan

yang akan terjadi atau yang akan muncul dikarenakan pada dasarnya kebijakan itu akan berhasil apabila petugas yang melaksanakan sesuai dengan prosedur pelaksanaan yang telah dikeluarkan.

Dalam pelaksanaan program ada beberapa hambatan yang dialami oleh pihak pemerintah desa seperti SDM yang kurang memadai sehingga ada beberapa kelalaian saat proses pelaksanaan program dan untuk masyarakat sendiri hambatan yang terjadi sudah diatasi oleh pemerintah desa yang melakukan kerjasama dnegan puskesmas yaitu dengan mendatangi rumah setiap anak, memberikan vitamin, dan kemudian dalam program dapur stunting juga membantu mengantakan makanan.

Maka hasil penelitian yang ditemukan oleh penliti dapat disimpulkan bahwa beberapa program yang dijalankan oleh pemerintah desa yang bekerja sama dengan Puskesmas dan BKKBN belum optimal karena terdapat hambatan seperti kurangnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam hal ini pada saat menjalankan kegiatan sosialiasi yang tidak merata kemudian dalam proses pembagian/pengantaran makanan dari program dapur stunting yang tidak menentu dan digabung untuk makan pagi dan siang.

3. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki

Bahwa keberhasilan suatu implementasi mengacu dan mengarah pada pelaksanaan dan dampaknya yang dikehendaki dari semua program. Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh *Randall B Ripley and Grace A Franklin* dalam Tahir (2014) mengemukakan bahwa ‘dalam proses keberhasilan suatu kebijakan dilihat dari kinerja aparaturnya yang dapat menentukan kebijakan tersebut”. Dilansir dari laporan Tim Percepatan Penurunan Stunting di Sulawesi Utara untuk kasus stunting yang terdeteksi di semua kabupaten salah satunya kabupaten minahasa uatra dengan angka stunting berjumlah 93 pada tanggal 08 Januari 2024 saat penarikan data oleh Tim Percepatan Penurunan Sunting Sulawesi Utara.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa untuk angaak stunting di Minahasa Utara tidak berkurang selama kurang lebih 3 bulan dari data riset terakhir bulan oktober sampai pengumpulan data bulan januari 2024.Maka hasil penelitian yang ditemukan ole peneliti dapat disimpulkan bahwa kinerja dari pemerintah yang belum optimal dari beberapa program membuat capaian target dan program ini belum 100% tepat sasaran karena masih banyak keluhan dari masyarakat mengeni informasi dan melihat ada satu desa yang ternyata mengalami peningkatan kasus stunting pada bulan Januari 2024 yang merupakan dampak dari program yang belum optimal.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap implementasi kebijakan pemerintah dalam pencegahan stunting di Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara diperoleh kesimpulan bahwa implementasi kebijakan dalam pencegahan stunting belum optimal dapat dilihat dari 3 aspek yaitu

1. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku,dalam hal ini ada beberapa program yang sudah

dilaksanakan yaitu sosialiasi dapur stunting dan posyandu. Namun untuk program dapur stunting tidak semua desa melaksanakannya.

2. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi, yaitu keberhasilan sebuah kebijakan di tentukan dari tingkat kelancaran program yang telah dibuat. Dalam hal ini ada beberapa kendala dalam pelaksanaan program yaitu kurangnya SDM sehingga pelaksanaan program sehingga mendapat keluhan dari beberapa masyarakat khususnya orang tua anak stunting dan juga kurangnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi hambatan kelancaran program.

3. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki, dari semua program yang berjalan belum dikatakan berhasil karena kinerja dari pemerintah khususnya SDM dalam program dapur stunting yang masih kurang sehingga berdampak pada penurunan angka stunting.

Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini yaitu

1. Diharapkan semua pihak dapat meningkatkan upaya koordinasi dan komunikasi baik tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa untuk bisa meningkatkan sosialisasi dan pemahaman terkait pencegahan stunting di semua sektor dan lapisan masyarakat.
2. Melakukan upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia agar semua program atau kebijakan yang telah dibuat bisa berjalan lancar dengan harapan membawa dampak yang baik bagi masyarakat untuk percepatan penurunan dan pencegahan stunting.
3. Kemudian untuk program dapur stunting kiranya menjadi program tetap yang bisa dilaksanakan satu kali dalam satu minggu agar anak stunting bisa mendapatkan gizi yang sesuai dan juga anak yang berpotensi stunting bisa ditangani sejak dini sebelum dinyatakan stunting.

DAFTAR PUSTAKA

Artanti, S., & Meikawati, P. R. (2021). Pelaksanaan Kegiatan Posyandu Balita pada Masa Pandemi Covid-19 sebagai Upaya Pemenuhan Hak Balita sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 4 Tahun 2019. *Jurnal Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan*, *8*(2), 130-138.

AL Mubarak. M. H. 2022. Implementasi *Susutainable Development Goals (SDGs*) Dalam Bidang Kesehatan Pencegahan Stunting Di Desa TANETE Kecamatan TOMPOBULU Kabupaten GOWA. Universitas Muhammadiyah Makassar. Skripsi.

Rahmasari, S. A., & Wicaksono, I. (2022). Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting Di Kabupaten Jember Dalam Upaya Percepatan Pencapaian Target Sustainable Development Goals. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Jember*.

Noviyanti, A. D. (2022). *Pelaksanaan Program Pencegahan Dan Penurunan Stunting Oleh Puskesmas Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Mudi, S. D. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Dalam Penurunan Dan Penanggulangan Stunting Di Desa Longkeyang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang Tahun 2021. *Journal of Politic and Government Studies*, *11*(4), 105-117.

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RISEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN. 2021. “Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting” (https://stunting.go.id/perpres-nomor-72-tahun-2021-tentang-percepatan-penurunan-stunting/)

Dasar Metodologi Penelitian . Yogyakarta : Literasi Media Publishong

Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. 2023. “ Prevelenasi Stunting Di Indonesia Turun ke 21,6 % dari 24,4%”. (https://www.kemkes.go.id/id/rilis-kesehatan/prevalensi-stunting-di-indonesia-turun-ke-216-dari-244